

**Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang**

**Tahun 2000 – 2015**

**JURNAL PUBLIKASI**



**Oleh :**

**Nama : Sandhi Kusuma Putra**

**Nomor Mahasiswa : 14313380**

**Jurusan : Ilmu Ekonomi**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**FAKULTAS EKONOMI**

**YOGYAKARTA**

**2016**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti dimaksud dala buku pedoman penyusunan skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pertanyaan ini tidak benar maka Saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Desember 2016



Penulis,

Sandhi Kusuma Putra

**Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang  
Tahun 2000 – 2015**

**JURNAL PUBLIKASI**

**Sandhi Kusuma Putra  
Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Pengeluaran pembangunan, dan Penanaman Modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magelang pada tahun 2000 - 2015. Data diperoleh dari yaitu (1) Badan Pusat Statistik di Kabupaten magelang dan website nya <https://www.magelangkab.bps.go.id>. (2) BPPMPT (Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu) (3) Website Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan <https://www.djpk.kemkeu.go.id>. Data di Analisis dengan Regresi Berganda menggunakan metode *Ordinary Least Square (OLS)* dengan alat analisis *software E-Views*. Hasil dari analisis tersebut adalah, (1) Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang tidak berpengaruh terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang karena pendapatan daerah Kabupaten Magelang sebagian besar digunakan untuk belanja tidak langsung atau belanja operasional. (2) Dana Bagi Hasil Kabupaten Magelang berpengaruh negatif terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang karena Dana Perimbangan sebagian besar dialokasikan untuk belanja tidak langsung. (3) Pengeluaran Pembangunan tidak berpengaruh terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang karena Pengeluaran Pembangunan Kabupaten Magelang di dominasi oleh Pembentukan Dana Cadangan dibanding Penyertaan Modal. (4) Penanaman Modal Kabupaten Magelang berpengaruh positif terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang. Penelitian ini mempunyai kesimpulan (1) bahwa dari 4 (empat) variabel independen yaitu 2 (dua) yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel independen yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) dan Penanaman Modal (PM). (2) Berdasarkan pengujian secara keseluruhan didapat variabel penjelas Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Pengeluaran Pembangunan, dan Penanaman Modal bersama-sama mempengaruhi nilai Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang dilihat dari nilai F hitung lebih tinggi dari F tabel dan P-Value lebih kecil dari 0.005.

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Daerah, Modal, dan Pengeluaran Pembangunan.

## **ABSTRACT**

*This study aimed to analyze the influence District Own Source Revenue, Revenue Sharing Fund, construction spending, and Investment to economic growth in Magelang District in the years 2000 to 2015. The data are taken from: (1) The Central Bureau of Statistics in the district of Magelang and his website <https://www.magelangkab.bps.go.id>. (2) BPMPPT (Board of Investment and Integrated Licensing Services) (3) Website of the Directorate General of Fiscal Balance <https://www.djpk.kemkeu.go.id>. Data in Multiple Regression Analysis with using ordinary least squares (OLS) analysis tool software E-Views. The results of the analysis is, (1) the original income Magelang regency does not affect the Magelang District Economic Growth Rate for revenue Magelang regency mostly used for indirect expenditure or operational expenditure. (2) DBH Magelang regency negatively affect the pace of economic Pertubuhan Magelang regency due largely Balance Funds allocated to indirect expenditures. (3) Development Spending does not affect the Magelang District Economic Growth for Development Spending Magelang regency is dominated by the Establishment of the Reserve Fund than Equity. (4) Investment Magelang regency positive effect on Economic Growth Magelang regency. This study has concluded (1) that of the four (4) independent variable is 2 (two) which significantly affect the independent variables, DBH (DBH) and Investment (PM). (2) Based on the overall test obtained an explanatory variable PAD, DBH, Development Spending, Investment and together affect the value of Economic Growth Magelang regency views of F count is higher than F table and P-values less than 0005.*

*Keywords : Economic Growth, Local Revenue, Capital and Development Spending, Fiscal decentralization, autonomy*

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah daerah dituntut untuk bisa lebih mandiri dalam mengelola penerimaan daerah yang ditujukan untuk proses restrukturisasi pembangunan daerah. Otonomi daerah merupakan salah satu bentuk dari program pemerintah yang dibuat dengan tujuan agar dapat menyelesaikan permasalahan daerah dalam mengelola informasi kedaerahan, membuat pemerintah daerah berada dalam posisi lebih baik, untuk memobilisasi sumber daya secara mandiri serta untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah. Desentralisasi fiskal merupakan konsekuensi logis dari diterapkan kebijakan otonomi daerah. Desentralisasi fiskal merupakan suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan yang dilimpahkan. Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah dan kabupaten/kota didasarkan kepada desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan kewenangan pemerintah pusat oleh pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Melalui desentralisasi kesejahteraan masyarakat di daerah akan lebih cepat terwujud karena pemerintah daerah akan lebih fleksibel bertindak dalam respons perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat di daerah. salah Satu tolok ukur penting dalam

menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi salah satunya yaitu pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi adalah dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Supaya pertumbuhan ekonomi meningkat pembuatan perencanaan pembangunan ekonomi dan pembuatan kebijakan-kebijakan disetiap daerah terlebih dahulu harus mengenali karakter ekonomi, sosial, dan fisik daerah itu sendiri, termasuk interaksinya dengan daerah lain, agar strategi pembangunan ekonomi tersebut tepat dan dapat berjalan dengan baik sehingga penerapan otonomi daerah yang luas merupakan tujuan pemerintah agar daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat yang telah digariskan dalam Undang-Undang No.32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5.

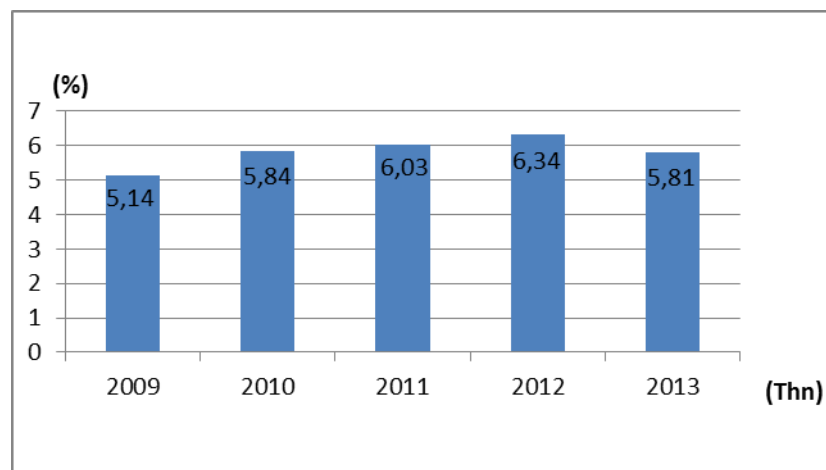
Undang-Undang No. 33 tahun 2004 mensyaratkan adanya suatu perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam rangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta pemerataan daerah secara proposional, adil, demokratis dan transparan. Sumber Penerimaan daerah yang digunakan untuk pendanaan daerah menurut Undang-Undang No.33 tahun 2004 dalam pelaksanaan desentralisasi meliputi :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Alokasi Khusus (DAK)
3. Dana Alokasi Umum (DAU)
4. Dana Bagi Hasil (DBH)

## 5. Pinjaman Daerah dll

Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan bagi daerah untuk meningkatkan kemampuan pendapatannya dengan meluaskan jangkauan dari bagian pajak dan bagi hasil sumber daya alam dengan pemerintah pusat. Namun, kenyataannya dimana daerah diberi kewenangan dalam mengatur keuangan daerahnya belum menunjukkan perubahan yang signifikan dalam PDRBnya. Meskipun PDRB bukan satu-satunya indikator dalam pembangunan.

Pada Gambar 1.1 bisa dilihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah mengalami peningkatan dari tahun 2009, namun pada tahun 2013 laju pertumbuhan mengalami penurunan.



Sumber : <http://www.bps.go.id>

Gambar 1.1  
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah  
Tahun 2009-2013

Kondisi laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah pada tahun 2009 sampai 2013 tersebut bisa dikatakan bahwa era desentralisasi fiskal belum

secara optimal menunjukkan perubahan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Melihat gambaran kondisi setelah pelaksanaan desentralisasi fiskal, dapat diketahui bahwa daerah belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan dan masih ada kesenjangan antar daerah walaupun keleluasaan untuk mengelola sesuai dengan keinginan atau kebutuhan. Dampak tersebut juga dialami oleh Kabupaten Magelang dikarenakan Kabupaten Magelang tidak mempunyai sektor andalan untuk pengembangan ekonomi. Menurut penelitian yang dilakukan Nur Fajri Rahmawati yang meneliti tentang pengaruh agropolitan terhadap perkembangan ekonomi 7 kawasan di kabupaten magelang telah mendapat kesimpulan bahwa pelaksanaan agropolitan masih banyak menemui kendala yang berkaitan dengan pengadaan modal, pengadaan teknologi dan sumberdaya pelaku atau petani yang kurang berkembang dan hanya sebagian yang mengalami perkembangan ekonomi, Artinya pertanian kurang berpengaruh besar di Kabupaten Magelang dan jika modal menjadi kendala maka salah satu permasalahannya adalah pendapatan yang dihasilkan oleh daerah belum begitu cukup besar. Pada tabel 1.1, yaitu perbandingan Pendapatan Asli Daerah antara Kabupaten Magelang dengan Kabupaten Semarang.



Tabel 1.1  
Perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang  
Tahun 2008 – 2013 (juta rupiah)

Tahun	Kabupaten Magelang	Kabupaten Semarang
2008	78.119,51	82.942,88
2009	75.582,20	90.188,00
2010	76.057,77	98.831,14
2011	90.462,63	134484,58
2012	123.722,78	156.104,00
2013	173.253,65	215.679,55

Sumber :<http://www.djpk.kemekeu.go.id>

Pada Tabel 1.1 bisa dilihat besaran nilai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang dari tahun 2008 – 2013. Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan Kabupaten Magelang dari tahun ke tahun belum menunjukkan tercapainya cita-cita desentralisasi yang maksimal. Terbukti masih belum dapat bersaing dengan Pendapatan Asli daerah Kabupaten Semarang. Kewenangan yang diberikan pemerintah pusat untuk daerah mengenai keleluasaan dalam mengatur keuangan daerahnya sendiri belum dilakukan dengan maksimal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya desentralisasi fiskal, daerah mempunyai kewenangan yang lebih besar untuk mengoptimalkan PAD-nya sehingga seharusnya porsi PAD sebagai komponen penerimaan daerah juga meningkat. Peningkatan PAD yang dianggap sebagai

modal, secara akumulasi akan lebih banyak menimbulkan eksternalitas yang bersifat positif dan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi (Pujiati, 2008).

Kuncoro (2004) berpendapat bahwa realitas hubungan yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah ditandai dengan tingginya control pusat terhadap proses pembangunan daerah. Proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah termasuk rendah jika dibandingkan dengan besarnya subsidi (grant) yang diberikan pusat. Senada dengan Kusumadewi (2010) berpendapat bahwa peranan PAD terhadap pengeluaran rutin dan total pengeluaran APBD akan semakin menurun. Hal ini mengindikasikan komposisi peranan mekanisme transfer dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan mengalami peningkatan untuk mendanai pelayanan publik. Artinya daerah yang menerima dana perimbangan lebih besar, menunjukkan bahwa PAD yang dapat dihasilkan pada daerah tersebut terbilang kecil dan memiliki potensi sumber daya yang masih kurang, sehingga perlu dana penyeimbang dari pemerintah pusat agar dapat menutupi kekurangan dari potensi sumber daya yang dimiliki pada daerah tersebut. Maka dari itu, keberhasilan desentralisasi fiskal bukan hanya dilihat dari meningkatnya jumlah PAD tetapi juga dari proporsi transfer dana dari pusat yakni berupa dana perimbangan.

Kabupaten Magelang berada di jalur strategis yang menghubungkan dua ibu kota Provinsi yaitu Semarang dan Yogyakarta. Daerah yang strategis tersebut bisa lebih mendapatkan pendapatan atau masukan yang lebih tinggi dan dapat menjadikan pengaruh yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi

di Kabupaten Kabupaten Magelang karena dapat dimanfaatkan sebagai aktifitas ekonomi misalnya perdagangan atau dapat didirikan tempat istirahat (*rest area*) yang didalamnya terdapat banyak aktivitas ekonomi lain yang mampu menambah pendapatan daerah sekitarnya sehingga mendorong pembangunan infrastruktur lainnya dan semakin kedepan semakin bertambah maju dari segi pertumbuhan ekonominya.

Laju pertumbuhan perekonomian juga menunjukkan tingkat kenaikan GNP riil. Faktor penyebab pertumbuhan GNP riil adalah jumlah sumber daya yang tersedia mengalami perubahan. Sumber daya dalam perekonomian dibagi menjadi barang modal dan tenaga kerja. Penanaman modal (PM) merupakan langkah awal kegiatan pembangunan sehingga investasi pada hakekatnya juga merupakan awal kegiatan pembangunan ekonomi. Urgensi tentang pembentukan modal di daerah juga mendapat perhatian dan penekanan oleh Zaris (1987) yang menyatakan bahwa investasi memainkan peranan penting dalam membentuk pola pembangunan di daerah. Investasi ini akan menyebabkan terbentuknya modal daerah (*regional capital formation*). Hal ini merupakan konsekwensi logis dari terbatasnya sumber daya, teknologi dan modal yang dimiliki oleh daerah.

Jawa Tengah usaha-usaha menjalankan program pembangunan melalui kebijakan penanaman modal (PM) swasta sebenarnya telah dilakukan sejak pelita I yaitu dengan dikeluarkannya serangkaian kebijakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Badan Penanaman Modal setempat dan mendapatkan momentumnya pada awal pelita III dimana peran swasta dalam pembangunan

pada waktu itu dirasakan sangat diperlukan. Inti dan maksud dari berbagai kebijakan tersebut tentu saja agar para investor mau menanamkan modalnya di Jawa Tengah. Pada dasarnya investasi merupakan pembentukan modal yang mendukung peran swasta dalam perekonomian. Menurut Harrod-Domar, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan investasi-investasi baru sebagai stok modal seperti penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing.

Penanaman modal (PM) asing sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Penanaman modal asing memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan pinjaman komersil untuk pembiayaan pembangunan. Penanaman modal asing merupakan salah satu sumber dana dan jasa pembangunan di negara sedang berkembang berkat sifat khususnya berupa paket modal, teknologi, dan keahlian manajemen yang selektif serta pemanfaatannya dapat disinkronkan dengan tahapan pembangunan negara yang bersangkutan (Musleh Jawas, 2008).

Penanaman modal (PM) asing membantu mengurangi kekurangan tabungan domestik melalui tambahan modal dengan demikian menaikkan laju tabungan marginal dan laju pembentukan modal. Selain itu, penggunaan modal asing tidak hanya mengatasi kekurangan modal tetapi juga keterbelakangan teknologi.

Bersamaan dengan modal uang dan modal fisik, modal asing juga membawa serta keterampilan teknik, tenaga ahli, pengalaman organisasi, informasi pasar, teknik-teknik produksi maju, pembaharuan produk, dan lain-

lain. Ia juga melatih tenaga kerja setempat pada keahlian baru. Semua ini mempercepat pembangunan ekonomi. Dengan demikian pembiayaan pembangunan yang berasal dari investasi asing sangatlah penting artinya bagi pembangunan ekonomi. Penanaman modal yang dialokasikan ke dalam proyek pembangunan, berarti akan menambah kapital yang pada selanjutnya tambahan kapital tersebut akan berakibat pada peningkatan taraf hidup masyarakat, yang mana salah satu indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi.

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah). DBH yang ditransfer pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu DBH pajak dan DBH bukan pajak (Sumber Daya Alam). DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK. Secara teoritis Pemerintah daerah akan mampu menetapkan belanja modal yang semakin besar jika anggaran DBH semakin besar pula, begitupun Sebaliknya semakin kecil belanja modal yang akan ditetapkan jika anggaran DBH semakin kecil. DBH berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Arbie Gugus Wandira, 2013).

Pengeluaran pembangunan (PP) pemerintah daerah merupakan salah satu faktor lain yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah yang terlalu kecil akan merugikan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah yang boros akan menghambat pertumbuhan ekonomi tetapi pengeluaran pemerintah yang proposional akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Prasetyo, 2007).

Berdasarkan masalah yang dipaparkan di atas peneliti tertarik untuk mengestimasi bagaimana pengaruh dan seberapa besar pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Penanaman Modal (PM), dan Pengeluaran Pembangunan (PP) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magelang pada tahun 2000 – 2015 dengan judul “**Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang Tahun 2000 – 2015**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka pertanyaan yang menarik untuk diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magelang tahun 2000 - 2015?
2. Bagaimana pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magelang tahun 2000 - 2015?
3. Bagaimana pengaruh Penanaman Modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magelang tahun 2000 - 2015?
4. Bagaimana Pengaruh Pengeluaran Pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magelang tahun 2000 - 2015?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magelang tahun 2000 - 2015.
2. Untuk menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magelang tahun 2000 - 2015.
3. Untuk menganalisis pengaruh Penanaman Modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magelang tahun 2000 - 2015.
4. Untuk menganalisis Pengaruh Pengeluaran Pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magelang tahun 2000 - 2015.

### **2. LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA**

Berbagai teori yang akan dikemukakan adalah merupakan dasar dalam perumusan hipotesis dan landasan dalam melakukan analisis penelitian ini. Dalam landasan teori ini dibahas mengenai desentralisasi fiskal di Indonesia, hubungan antara otonomi daerah dan pertumbuhan ekonomi, penerimaan daerah (komponen desentralisasi fiskal), Penanaman Modal, dan infrastruktur daerah. Dasar teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian adalah teori pertumbuhan, antara lain teori pertumbuhan klasik, teori pertumbuhan Adam Smith (1723-1790), teori pertumbuhan Solow Swan, dan teori pertumbuhan Harrod Domar. Disamping itu, untuk dapat membandingkan hasil-hasil penelitian sejenisnya atau yang memiliki tema hampir sama secara empiris, maka dilengkapi juga dengan beberapa penelitian

terdahulu pertumbuhan ekonomi. Penelitian-penelitian tersebut kemudian digunakan menjadi acuan serta pembanding dalam penelitian ini.

Fajar Prabowo (2010) melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis faktor faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten tahun 1988 – 2007 dengan variabel Independenya yaitu ; Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Penanaman Modal (PM), dan Pengeluaran Pembangunan (PP). Penelitian tersebut menggunakan alat analisis Regresi Berganda dengan metode *Ordinary Least Square (OLS)* dan memperoleh hasil bahwa Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pembangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi sementara dalam hipotesis yang dikemukakan penulis bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi sehingga kesimpulannya dituliskan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak dapat mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten, Oleh karena itu penulis mengimplikasikan terjadinya miss alokasi atau ketidakefisienan dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Klaten.

Amin Pujiati (2008) melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis Pertumbuhan Ekonomi Karesidenan Semarang era Desentralisasi Fiskal dengan menggunakan beberapa variabel yaitu sumber penerimaan daerah antara lain Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Bagi Hasil (DBH) , peneliti menemukan bahwa DAU



berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini tidak mendukung teori pertumbuhan Neo Klasik yang beranggapan bahwa modal akan mempercepat pertumbuhan. Hal ini membuktikan meskipun ada keleluasaan dalam mengelola keuangan daerah, daerah belum dapat menetapkan skala prioritas pembangunan daerah secara optimal atas sektor-sektor pembangunan. Penetapan skala prioritas pembangunan akan memberikan efek multiplier terhadap perekonomian masyarakat, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Joko Waluyo (2007) melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Indonesia dengan metode persamaan simultan dengan data panel teknik estimasi *Two Stage Least Square* (TSLS). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data atas dasar harga konstan tahun 2003 dan berupa data level pada tingkat propinsi. Data bersifat data panel (*pooled data*) terdiri dari 33 propinsi dan dalam waktu 5 tahun (2001 – 2005). Peneliti tersebut memperoleh kesimpulan bahwa Dampak desentralisasi fiskal terhadap kesenjangan pendapatan antardaerah lebih terasa di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dibandingkan dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI). Hal ini ditunjukkan dengan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di KTI dan berada diatas rata-rata nasional. Pulau Jawa dan Bali merupakan daerah yang paling rendah pertumbuhannya dengan adanya kebijakan desentralisasi fiskal. Kesimpulan secara umum menunjukkan bahwa

kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia belum mampu mengurangi kesenjangan pendapatan antardaerah.

Hadi Sasana (2006) melakukan penelitian dengan tujuan menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, kesenjangan ekonomi antar daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesenjangan ekonomi antar daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode Analisis Jalur (*Path Analysis*) melalui analisis regresi. Penelitian ini dilakukan secara sensus dengan data sekunder berbentuk *time series* dari tahun 2001 sampai 2005, dan data *cross section* yang terdiri atas 35 Kabupaten/Kota. Variabel penelitian ini adalah Desentralisasi Fiskal ( $X^1$ ), Pertumbuhan Ekonomi ( $Y^1$ ), dan Kesenjangan Ekonomi antar Daerah ( $Y^2$ ). Kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi di daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap kesenjangan ekonomi antara daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap kesenjangan ekonomi antar daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Priyo Hari Adi (2006) melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis dampak pertumbuhan ekonomi daerah dan belanja pembangunan terhadap kemandirian daerah di Kabupaten/Kota se Jawa – Bali. Data yang

akan digunakan dalam penelitian ini adalah data APBD realisasi pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa-Bali tahun 1998 – 2003. Untuk kepentingan analisis, data akan dikelompokkan menjadi data sebelum dan data sesudah pelaksanaan desentralisasi. Data sebelum desentralisasi adalah data APBD, PDRB maupun pendapatan per kapita untuk tahun 1998 – 2000. Sedangkan data sesudah pelaksanaan desentralisasi adalah data-data yang sama untuk tahun 2001 – 2003. Penelitian tersebut menunjukkan beberapa bukti empiris penting bahwa pertumbuhan ekonomi daerah mempunyai dampak yang signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Sayangnya pertumbuhan ekonomi pemda kabupaten dan kota masih kecil, akibatnya penerimaan PAD-nya pun kecil. Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah, penerimaan yang menjadi andalan adalah retribusi dan pajak daerah. Tingginya retribusi bisa jadi merupakan indikasi semakin tingginya itikad pemerintah untuk memberikan layanan publik yang lebih berkualitas. Belanja pembangunan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah maupun pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan Kajian Pustaka dan Landasan Teori yang telah dipaparkan di atas Penulis memperoleh hasil hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Diduga Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

3. Diduga Pengeluaran pembangunan (PP) berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
4. Diduga Penanaman Modal (PM) berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

### **3. METODE PENELITIAN**

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berbentuk Kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yang didapatkan dari studi pustaka tercetak dari buku-buku, dimana data yang diperoleh bersumber dari instansi atau lembaga yang relevan. Data *time series* di Analisis dengan Regresi Berganda menggunakan metode *Ordinary Least Square (OLS)* dengan alat analisis *software E-Views*

### **4. HASIL DAN ANALISIS**

#### **4.1 Analisis Deskriptif**

Pertumbuhan Ekonomi rata-rata Kabupaten Magelang periode 2000-2015 adalah sebesar 11.67%, minimum sebesar 8.55% dan maksimum sebesar 13.2%. Dana Bagi Hasil rata-rata Kabupaten Magelang periode 2000-2015 adalah sebesar 33.600.000.000 rupiah, maximum sebesar 58.800.000.000 rupiah dan minimum sebesar 72.200.000.000 rupiah. Pendapatan Asli Daerah rata-rata Kabupaten Magelang periode 2000-2015 adalah sebesar 86.500.000.000 rupiah, minimum sebesar 11.946.6118.000 rupiah dan maksimum sebesar 242.000.000.000 rupiah. Pengeluaran Pembangunan rata-

rata pada Kabupaten Magelang periode 2000-2015 adalah sebesar 30.700.000.000 rupiah, minimum sebesar 6.510.000.000 rupiah dan maksimum sebesar 74.600.000.000 rupiah. Penanaman Modal rata-rata Kabupaten Magelang periode 2000-2015 adalah sebesar 38.213.680.000 rupiah, minimum sebesar 6.510.000.000 rupiah dan maksimum sebesar 74.600.000.000 rupiah.

#### **4.2 Uji Signifikansi**

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang, hal ini ditunjukkan dengan nilai P-value (0.8389) yang lebih besar dari nilai cut off 0.1. Sehingga  $H_1$  ditolak karena  $H_0$  diterima sehingga PAD tidak berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Dana Bagi Hasil Kabupaten Magelang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang, hal ini ditunjukkan dengan nilai P-value (0.0416) yang lebih kecil dari nilai cut off 0.1. Sehingga  $H_1$  diterima dengan demikian DBH berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Pengeluaran Pembangunan (PP) Kabupaten Magelang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang, hal ini ditunjukkan dengan nilai P-value (0.4245) yang lebih besar dari nilai cut off 0.1. Sehingga  $H_1$  ditolak karena  $H_0$  diterima sehingga PP tidak berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Penanaman Modal (PM) Kabupaten Magelang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang, hal ini ditunjukkan dengan nilai P-value (0.0044) yang lebih kecil dari nilai cut off 0.1. Sehingga  $H_0$  ditolak karena  $H_1$  diterima sehingga PM berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

#### **4.3 Uji Asumsi Klasik**

Dilakukan uji Asumsi Klasik meliputi Multikolinearitas, Autokorelasi, Heteroskedastisitas, dan uji Normalitas dari hasil yang ada diperoleh bahwa data tidak ditemukan adanya masalah Asumsi klasik.

#### **4.4 Pembahasan**

Dari hasil analisa diperoleh bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang. Karena Pendapatan daerah salah satunya Pendapatan Asli Daerah Magelang lebih banyak di gunakan untuk belanja tidak langsung daripada belanja langsung. Bisa dilihat di APBD Realisasi Kab. Magelang. Sebagai contoh APBD Relisasi tahun 2012 proporsi belanja tidak langsung terhadap total belanja sebesar 91% sedangkan proporsi belanja modal terhadap total belanja hanya sebesar 8%. Pendapatan yang di hasilkan dari Nilai Pendapatan Asli Daerah juga relatif kecil hanya sebesar 123,722.78 juta rupiah kira-kira 13% dari nilai Dana Perimbangan.

Selanjutnya, hasil analisa menunjukkan Pengeluaran Pembangunan Kabupaten Magelang juga tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan ekonomi

Kabupaten tersebut, Hal ini dikarenakan Pengeluaran Pembangunan tidak secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi artinya mempengaruhi dalam waktu jangka panjang sebab pengeluaran pembangunan akan di alokasikan untuk pembangun infrastruktur terlebih dahulu baru akan menumbuhkan kegiatan ekonomi sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, disamping itu Pengeluaran Pembangunan Kabupaten magelang didominasi oleh Pembentukan Dana Cadangan dibanding Penyertaan Modal. Sebagai contoh APBD Realisasi tahun 2013 nilai Penyertaan Modal hanya sebesar 12,61% dari total pembiayaan sisanya kurang lebih sebesar 87% digunakan sebagai Pembentukan Dana Cadangan.

Peningkatan Dana Bagi Hasil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan menjadi tambahan anggaran untuk daerah dalam membangun infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penanaman modal merupakan langkah awal kegiatan produksi. Dengan posisi semacam itu, penanaman modal pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan. Penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan marak lesunya pembangunan. (Dumairy, 1996). Namun dari hasil analisa diatas Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Magelang berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang artinya apabila Dana Bagi Hasil tersebut mengalami peningkatan maka Pertumbuhan justru akan menurun. Hal ini dikarenakan karena nilai Pendapatan Daerah sebagian besar digunakan untuk belanja tidak langsung atau belanja operasional dari pada belanja langsung atau belanja

modal, karena nilai PAD Kabupaten Magelang yg relative kecil dari tahun ketahun di banding dana perimbangan maka pengalokasian Dana Perimbangan salah satunya Dana Bagi Hasil di gunakan untuk menutup nilai PAD Kabupaten Magelang yang relative sangat kecil tersebut. Bisa dilihat pendapatan daerah tersebut juga banyak di gunakan untuk belanja operasional dibanding belanja modal yang artinya tidak dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Penanaman Modal (PM) mempunyai hubungan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang sehingga sungguh pantas bila pemerintah meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Magelang.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pengujian secara keseluruhan (uji F) didapat nilai F hitung lebih tinggi dari F table dan P-value lebih kecil dari 0.005. Berarti secara bersama-sama variabel penjelas yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Pengeluaran Pembangunan (PP) dan Penanaman Modal (PM) mempengaruhi nilai Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang.

Penafsiran koefisien determinan ( $R^2$ ) untuk mengukur seberapa besar variasi varian variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian mampu menjelaskan variasi varian yang terjadi pada variabel Pertumbuhan Ekonomi. Dari perhitungan diperoleh hasil bahwa R sebesar 0.647810 atau sekitar 64.78% dari variasi varian Pertumbuhan Ekonomi



Kabupaten Magelang dapat dijelaskan oleh variasi varian PAD, DBH, PP, dan PM sebesar 64,78%.

Dari hasil regresi berganda yang dilakukan diketahui bahwa Pertumbuhan Ekonomi sebesar 9.82 jika variabel lainnya sebesar nol, apabila *PAD* naik sebesar satu rupiah, maka Pertumbuhan ekonomi akan naik sebesar  $1.08E-12$ , apabila *DBH* naik sebesar satu rupiah, maka Pertumbuhan ekonomi akan turun sebesar  $-4.77E-11$ , apabila *PP* naik sebesar satu rupiah, maka Pertumbuhan Ekonomi akan naik sebesar  $1.19E-11$ , apabila *PM* naik sebesar satu juta rupiah, maka Pertumbuhan Ekonomi akan naik sebesar  $6.53E-05$ .

## **5.2 Saran**

Pemda perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan mengalokasikan dengan tepat supaya PAD dapat mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan meningkatkan juga penanaman modal yang masuk ke Kabupaten Magelang, baik dari penanaman modal asing, swasta lokal maupun penanaman modal pemerintah dengan memaksimalkan kekayaan sumber daya alam seperti tempat-tempat wisata, daerah industri dll.

Bagi peneliti selanjutnya, dari keterbatasan penelitian ini disarankan untuk menambah data dalam variabel, baik Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Pengeluaran Pembangunan (PP), Penanaman Modal (PM) dan Pertumbuhan Ekonomi (Y) atau menambahkan jumlah variabel. Semakin banyak perolehan data dan jumlah variable dapat lebih meningkatkan kualitas hasil penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim (2004), *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi, UPP UMP YKPN, Yogyakarta.
- Amin Pujiati (2008), “Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang di Era Desentralisasi Fiskal”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 13, No.2 p. 61-70, Fakultas Ekonomi, UNES, Semarang.
- Arbie Gugus Wandira (2013), “Pengaruh Pad, Dau, Dak, Dan Dbh Terhadap Pengalokasian Belanja Modal”, *Accounting Analysis Journal* 02 Januari 2013, diambil dari <http://Journal.Unnes.Ac.Id/Sju/Index.Php/Aaj>
- Arikunto (2004), Suharsimi : *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta.
- Boediono (1992), *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Edisi Pertama. BPFE UGM, Yogyakarta.
- Davoodi, H. and H. Zou, (1998), *Fiscal Decentralization and Economics Growth: A Cross Country Study. Journal of Urban Economics* 43. Page 224-257.
- DJPK, Kemenkeu (2015), Data Series: Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Diambil 27 Agustus 2015, dari <http://www.djpk.kemkeu.go.id>
- Dumairy (1996), *Perekonomian Indonesia*. Penerbit Erlangga, Jakarta
- Fajar Prabowo (2009), “Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Klaten Tahun 1988-2007”, *Skripsi Sarjana* (tidak dipublikasikan), Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Gujarati Damodar (1998), *Ekonometrika Dasar*. Diterjemahkan Sumarno Zain. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Hadi Sasana (2006), “Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah”, *Skripsi Sarjana* (tidak dipublikasikan), Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Husna Umdatul, (2015), “Pengaruh Pdrb, Inflasi, Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Daerah Kota Se Jawa Tengah, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis” *Skripsi Sajana* (tidak dipublikasikan), Universitas Diponegoro Semarang.
- Jhingan (2003), *Ekonomi Pembangunan*. PT. Erlangga, Jakarta.

- Joko Waluyo (2007), "Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan antardaerah di Indonesia", *Tesis Pasca Sarjana* (tidak dipublikasikan), Fakultas Ekonomi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Yogyakarta.
- Kuncoro, M. (2004), *Otonomi Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Kusumadewi Indriasari (2010). "Pengaruh Desentralisasi Fiskal di Tingkat Provinsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Analisis Data Panel 1999 – 2008", *Tesis Pasca Sarjana* (tidak dipublikasikan), UI, Jakarta.
- Musleh Jawas (2008), "Pengaruh Penanaman Modal Asing Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Negara-Negara Muslim", *Skripsi Sarjana* (tidak dipublikasikan), Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Oates, W.E. (1993), *Fiscal Decentralization and Economics Development. National Tax Journal* 46. Page 237-243
- Prabowo Supranto (2004), "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonmi Tahun 1986-2002", *Skripsi Sarjana* (Tidak dipublikasikan), Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Prasetyo, Agus Arifin Catur (2007), "Analisis Kausalitas Antara Pengeluaran Pembangunan Dengan Penerimaan Pajak Di Jawa Tengah Tahun 1979-2004". *Tesis Pasca Sarjana* (tidak dipublikasikan), Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Priyo Hari Adi (2006), "Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)", *Simposium Nasional Akuntansi*, Padang.
- Rahmawati, Nur Fajri (2008), "Pengaruh Pelaksanaan Agropolitan Terhadap Perkembangan Ekonomi 7 Kawasan Agropolitan Kabupaten Magelang", *Skripsi Sarjana* (tidak dipublikasikan), Fakultas Pertanian, Intitut Pertanian Bogor, Bogor.
- Saragih, Juli Panglima (2003), *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sukirno, Sadono (2000), *Pengantar Makro Ekonomi*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suparmoko (2002), *Pengantar Ekonomi Makro: Teori, Soal dan Penyelesaiannya*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.

- Todaro, Michael P. and Smith Stephen C. (2003), *Economic Development*, Eighth Edition. Pearson Education Limited, United Kingdom.
- Todaro, Michael P. (2006), *Pembangunan Ekonomi di Dunia ketiga*, Edisi 9, Jilid 1. Diterjemahkan Drs. Haris Munandar, PT. Erlangga, Jakarta.
- Undang - Undang No. 32 Tahun 2004, *Tentang Pemerintahan Daerah*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004).
- Undang - Undang No. 33 Tahun 2004, *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004).
- Wandira, Arbie Gugus (2013), *Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal*, *Accounting Analysis Journal (Aaj)* 2 (1) (2013), Diambil dari <http://Journal.Unnes.Ac.Id/Sju/Index.Php/Aaj>.
- Zaris (1987), *Prespektif Daerah dalam Pembangunan Nasional*. LPFE Universitas Indonesia, Jakarta.